



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 173/MENKES/SK/IV/2013

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KESEPULUH
TAHUN 2013**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik, perlu diaupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis ;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kesepuluh Periode Januari Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/II/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan:
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Nomor : 8225/UN27.06/PP/2012 tanggal 8 Nopember 2012 perihal Pengusulan Peserta PPDSBK Kemenkes RI;
 2. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor : 4573/UN5.2.1.1/SDM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 perihal Daftar Nama Peserta Tubel Kemenkes RI Penerimaan PPDS-BK Periode Oktober 2012;
 3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor : 5776/UN11.1.17/DT/2012 tanggal 22 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan Hasil Seleksi Akademik PPDS-BK Gelombang X Tahun 2013 Kemenkes;
 4. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10960/UN16.2/PP-PPDS/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Penerimaan Peserta PPDS Penerima Beasiswa Menkes RI (Peserta PPDS-BK) Fakultas Kedokteran UNAND Periode Januari 2013;
 5. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 6426/UN4.7/PP.17/2012 tanggal 30 Nopember 2012 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPDS Bantuan Beasiswa Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode Januari 2013;
 6. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor : 5549/UN7.3.4/D/PP/2012 tanggal 5 Desember 2012 perihal Penerimaan Peserta PPDS-BK Kementerian Kesehatan;
 7. Surat a.n Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor : UGM/KU/5627/II/07/21 tanggal 3 Juli 2012 perihal Lolos Seleksi Tubel PPDS Kemenkes a.n. dr. Dewang Sadiyanto dkk;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor : 2017/H3.1.1/PPd/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Daftar Calon Peserta PPDS I Beasiswa Depkes Angkatan X;
9. Surat a.n. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Nomor : UGM/KU/214/I/07/21 tanggal 10 Januari 2013 perihal Hasil Seleksi Akademik Tubel PPDS Kemenkes Angkatan X-Januari 2013.
10. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor : 480/UN9.1.4.1/PP/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Daftar Nama Calon PPDS-BK yang masuk bulan Januari 2013.
11. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor : 0858/UN10.7/AK/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Lulus Tes Seleksi PS PDS I BK.
12. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Nomor : 408/UN6.C/PP/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal laporan Peserta PPDS-I FK Unpad Periode Maret 2013.
13. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Nomor : 32/UN.14.2/B.TKP-PPDS-I/1/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Peserta BK PPDS-I FK Unud.
14. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor : 3918/H3.1.2/PPd/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Seleksi Peserta PPDGSBK Bedah Mulut dan Maksilofasial.
15. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor : 3919/H3.1.2/PPd/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Seleksi Peserta PPDGSBK Bedah Mulut dan Maksilofasial.
16. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Nomor : 3920/H3.1.2/PPd/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal Seleksi Peserta PPDGSBK Bedah Mulut dan Maksilofasial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS ANGKATAN KESEPULUH TAHUN 2013**

KESATU : Daftar penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bantuan program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan mulai periode pendidikan Januari 2013;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA** : Bantuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 April 2013



NAFSIAH MBOI

Tembusan Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
9. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta;
10. Gubernur Kepala Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
13. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
14. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
15. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
16. Ketua Umum PB IDI di Jakarta;
17. Ketua Umum PB PDGI di Jakarta;
18. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan selaku Ketua Tim Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PDS/PDGS di Jakarta;
19. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Jakarta;
20. Ketua Pokja PPDS-BK Pusat di Jakarta;
21. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan di Jakarta;
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
24. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di Seluruh Indonesia;
25. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
26. Para Rektor Universitas penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
27. Para Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di seluruh Indonesia;
28. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan di Jakarta;
29. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ANGKATAN SEPULUH TAHUN 2013
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 173/MENKES/SK/IV/2013
Tanggal : 23 April 2013

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I LULUS SELEKSI AKADEMIK													
1	dr. Jatningsih	Surabaya, 15 Juli 1983	198307152010012027	PNSD	Kab. Pekalongan	RSUD Kajen Kab. Pekalongan	Dinkes Kab. Pekalongan	JATENG	Obstetri Ginekologi	Januari 2013	I	RSUD Kajen Kab. Pekalongan	
2	dr. Meiningasih Kusumawati	Jakarta, 22 Mei 1970	197005222006042000	PNSD	Kota Surakarta	RS. Jiwa Daerah Kota Surakarta	Dinkes Kota Surakarta	JATENG	Ilmu Kedokteran Jiwa	Januari 2013	I	RS. Jiwa Daerah Kota Surakarta	
3	dr. Fachnzal Rikardi	Jakarta, 30 Desember 1980	198012302010121002	PNSP	Kota Bukittinggi	RS Stroke Nasional Kota Bukittinggi	DITJEN BUK	SUMBAR	Anestesiologi	Januari 2013	I	RS Stroke Nasional Kota Bukittinggi	
4	dr. Inge Cahya Ramadhani	Jakarta, 21 Juni 1984	198406212010012032	PNSD	Kab. Banyumas	DKK Banyumas	Dinkes Kab. Banyumas	JATENG	Ilmu Penyakit Paru	Januari 2013	I	RSUD Kab. Banyumas	
II RESIDEN													
5	dr. F. X. Andhi Haris Respati	Jakarta, 30 Desember 1976	AKP. 76120912	POLRI	KORBRIMOB	KORBRIMOB POLRI	Pusdokes POLRI	MABES POLRI	Anestesiologi	JULI 2012	I	KORBRIMOB POLRI	
6	dr. Ibrahim Nasrul Fourida	06 Maret 1977	11060000430377	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Kedokteran Jiwa	Januari 2012	II	Ditkesad	
7	dr. Heri Heriambang	20 Mei 1974	11030001290574	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Juni 2012	I	Ditkesad	
8	dr. Aan Riswandi	14 Juni 1976	11040001690676	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Juni 2012	I	Ditkesad	
9	dr. Dramora Nepy Asmara	03 Januari 1979	11070042180179	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Penyakit Paru	Juni 2012	I	Ditkesad	
10	dr. Eka Prasetya	25 Maret 1980	11070043090380	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Ilmu Bedah	November 2012	I	Ditkesad	
11	dr. Claudia Ardiana	02 Oktober 1975	107510022007012001	PNS. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	Patologi Klinik	Januari 2013	I	Ditkesad	
12	dr. Kun Salimah	Kebumen, 5 Februari 1983	198302052010012018	PNSD	Kota Surakarta	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Dinkes Kota Surakarta	JATENG	Ilmu Penyakit Dalam	Agustus 2012	II	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	
13	dr. Umarudin	Brebes, 8 Mei 1976	197605082010011012	PNSD	Kab. Brebes	Puskesmas Bulakamba Brebes	Dinkes Kab. Brebes	JATENG	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2012	II	RSUD Kab. Brebes	
14	dr. Artien Adhiputri	Semarang, 2 September 1983	198309022009032010	PNSD	Kota Surakarta	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Dinkes Kota Surakarta	JATENG	Ilmu Penyakit Paru	Agustus 2012	II	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	
15	dr. Benny Wijaya Tambunan	Medan, 02 November 1978	197810022009041001	PNSD	Kab. Rote	Puskesmas Korbafo Kab. Rote Ndao	Dinkes Kab. Rote	NTT	Patologi Klinik	Juli 2011	IV	RSUD Ba'a Kab. Rote Ndao	
16	dr. Rahinadi Indra	Rengat, 6 Desember 1977	197712062008011018	PNSD	Kab. Indragiri Hilir	UPT Puskesmas Kempas Jaya Kab. Indragiri Hilir	Dinkes Kab. Indragiri Hilir	RIAU	Ilmu Bedah	Juli 2012	II	RSUD Puri Husada Kab. Indragiri Hilir	
17	dr. Ida Nurromdoni	Magetan, 16-10-1974	197410162008012001	PNSD	Prov. Jatim	BP 4 Madiun	Dinkes Prov. Jatim	JATIM	Ilmu Penyakit Paru	Juli 2012	II	BP 4 Madiun	
18	dr. Gatot Adnyadi Wibowo	Jakarta, 20 Juni 1981	11070046970681	TNI. AD	Ditkesad	Ditkesad	Ditjen Kuathan	KEMHAN	THT-KL	Januari 2013	I	Ditkesad	

